

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun judul penelitian ini adalah akibat hukum keterlambatan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 dengan rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua yakni pengaturan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi daerah oleh gubernur dan akibat hukum yang ditimbulkan atas keterlambatan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi daerah oleh gubernur.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi dan selanjutnya di teruskan kepada Menteri Keuangan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah masih menyisakan problematika hukum terkait dengan batas waktu evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ke Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum untuk dikoordinasikan Ke Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti dengan batas waktu 15 (Lima Belas) hari kerja.

Akibat hukum yang ditimbulkan atas keterlambatan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah adalah rancangan peraturan daerah yang terlambat mendapatkan hasil evaluasi dari Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan sehingga rancangan peraturan daerah tidak dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan demikian secara hukum rancangan peraturan daerah tidak dapat diberlakukan karena melanggar ketentuan pasal 69 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Akibat dari keterlambatan hasil evaluasi oleh gubernur sehingga memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah karena dalam pelaksanaannya, daerah tidak dapat melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selama proses evaluasi belum dilaksanakan, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Rancangan Peraturan Daerah-Hasil Evaluasi-Akibat Hukum

ABSTRACT

This study uses the type of legal research with the approach used is the approach law (statute approach), approach the case (case approach), and the conceptual approach (conceptual approach). The title of this research is the result of the legal delay evaluation draft regulation on regional tax and regional ritribusi by the Minister of Home Affairs Regulation No. 53 of 2011 with the formulation of the problem in this study consists of two draft regulatory evaluation of the setting district / city on tax and ritribusi area by the governor and the legal consequences for delays caused by the results of the draft regulatory evaluation of the district / city on taxes and levies by the governor.

The result showed that the Draft Regulation on Local Taxes and Levies that have been approved by the Head of the House of Representatives District / City before being passed to local regulation, must be submitted to the Governor through the Provincial Legal Bureau and subsequently forwarded to the Minister of Finance. In the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 53 Year 2011 on the Establishment of Regional Legal Products still leaves legal problems associated with the evaluation deadline Draft Regulation to the Provincial Government through the Bureau of Law to be coordinated to the Minister of Finance to be followed up with a time limit of 15 (Fifteen) working days .

As a result of the delay caused by legal evaluation draft local regulations is a late draft local regulations to get the evaluation of Governors through the Provincial Legal Bureau based on the coordination of the Ministry of Finance to draft local regulations can not be defined as a local regulation thus legally unable to draft local regulations imposed for violating the provisions of regulation 69 of the Minister of Home Affairs No. 53 of 2011 on the Establishment of Regional Legal Products. Due to delays on the evaluation by the governor to have an impact on revenue due to the implementation, the area can not do the collection of local taxes and levies during the evaluation process has not been implemented, so that the process of organizing government and regional development can not run optimally.

Keywords: Draft Regulation and Effect-Legal Evaluation